

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran merupakan dua institusi tradisional di Surakarta yang masih bertahan hingga saat ini. Kasunanan Surakarta maupun Kadipaten Mangkunegaran masing-masing dikukuhkan sebagai *Kochi* pada masa pendudukan Jepang.¹ Kepala pemerintahan dari setiap institusi tradisional yang menjabat di kedua wilayah ini berhak mendapatkan gelar *Koo*. Kekalahan Jepang atas perang Asia Timur Raya memberikan dampak longgarnya ruang bagi Bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

Melalui proklamasi, Bangsa Indonesia bertekad memulai lembaran kehidupan baru dalam menentukan arah dan nasibnya sendiri tanpa campur tangan penjajah lagi.² Keadaan negara yang baru saja menyuarkan kemerdekaannya ini harus menghadapi masa-masa sulit sepanjang periode tahun 1945-1950. Sepanjang kurun waktu tersebut seharusnya bangsa Indonesia sudah mulai membangun roda-roda ketatanegaraan dengan segala aparturnya, akan tetapi pada kenyataannya dihadapkan pada gejolak, pemberontakan dan perang saudara.³ Berbagai respon di daerah menyoroti kabar proklamasi Kemerdekaan Indonesia termasuk dua institusi tradisional Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran.

¹ Pada masa pendudukan Jepang, Surakarta dijadikan daerah istimewa yang melatarbelakangi penyebutan Surakarta Koo dan Mangkunegaran Koo dibahas dalam Julianto Ibrahim, Eksploitasi Ekonomi Pendudukan Jepang di Surakarta. (*Jurnal Humaniora*: Vol 16, No 1, 2004), hlm. 36.

² Joeniarjo. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. (Yogyakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 6.

³ Sartono Kartodirjo. *Kepemimpinan Dalam Sejarah Indonesia*. (Yogyakarta: Supersukses, 1982), hlm. 21.

Pada masa pemerintahan BRM Suryo Guritno yang juga dikenal sebagai Paku Buwono XII bersama dengan KPH Hamijaya Sarosa selaku Adipati Mangkunegara VIII memberikan dukungan diplomatis terhadap kedaulatan Indonesia. Kedua pemimpin tersebut memberikan respon dengan mengeluarkan maklumat kedudukan pada 1 September 1945.

Jauh sebelum terbitnya maklumat, pihak pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Soekarno sudah lebih dulu mengeluarkan piagam penetapan status dan regulasi pemerintahan. Paku Buwono XII bersama Adipati Mangkunegara VIII ditunjuk sebagai kepala pemerintahan Daerah Istimewa Surakarta. Pemerintah Indonesia memberikan hak istimewa kepada Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran dikarenakan kedua intitusi tradisional ini berperan aktif pada masa pergerakan nasional. Organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan Syarikat Islam mendapat dukungan penuh dari Kasunanan Surakarta.⁴

Pemberian hak istimewa atau swapraja itu mendapatkan berbagai respon dari masyarakat yang mendorong terjadinya pengelompokan sosial.⁵ Golongan masyarakat yang menghendaki keputusan Presiden Soekarno dalam memberikan hak istimewa ini kemudian dikenal sebagai golongan pendukung swapraja Surakarta. Golongan kedua, adalah golongan penengah yang mendukung pemberlakuan swapraja Surakarta dengan beberapa perombakan dan penyesuaian. Golongan ketiga sebagai golongan yang paling menonjol dan agresif menentang sistem feodalisme. Berbagai aksi gerakan politik yang memunculkan konflik

⁴ Sutyono., dkk. *Daerah Istimewa Surakarta*. (Yogyakarta: Putra Bangsa, 2004), hlm. 23-45.

⁵ Swapraja adalah daerah pemerintahan yang menggunakan hukum asli daerah tersebut dan diakui oleh pemerintahan pusat. *Ibid.*, hlm. 4-5.

dijalankan. Golongan ketiga ini dikenal sebagai kelompok Anti Swapraja Surakarta.⁶

Gerakan politik yang menentang pemberlakuan Daerah Istimewa Surakarta dipelopori oleh beberapa tokoh seperti Tan Malaka, dr. Moewardi, Mangkusudiono, Hadisunarto dan beberapa tokoh lain. Gerakan sosial yang menimbulkan konflik tersebut misalnya saja peristiwa perampasan-perampasan aset-aset tanah pertanian milik Kadipaten Mangkunegaran dan Kasunanan Surakarta untuk dibagikan secara sukarela kepada rakyat sebagaimana *landreform* gerakan komunis.⁷ Peristiwa penculikan dan bumi hangus mewarnai Surakarta. Kondisi itu cenderung berlawanan dengan Yogyakarta yang sama-sama mendapatkan hak istimewa namun terbebas dari gerakan Anti Swapraja.

Gerakan Anti Swapraja yang menyeruak di Surakarta memang disokong oleh kelompok-kelompok kiri. Kelompok ini mempunyai agenda besar untuk menolak suburnya kekuasaan feodalisme disamping mempersiapkan gerakan pemberontakan Madiun tahun 1948.⁸ Sikap lantang dan keras golongan Anti Swapraja di Surakarta juga ditunjukkan dengan banyaknya melakukan tindakan yang menimbulkan konflik. Kegeraman ditunjukkan dalam aksi penculikan Mangkunegara VIII dan Paku Buwono XII. Pembubaran paksa daerah-daerah yang

⁶ Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 448-449.

⁷ Purwodadi & Djoko Dwiyanto. *Kraton Surakarta* (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2008), hlm. 20-29.

⁸ Tersedia pada <https://tirto.id/penculikan-pakubuwono-xii-dan-dihapusnya-daerah-istimewa-surakarta-f8aC>. Diakses pada 17 September 2023 pukul 12.03 WIB.

tergabung dalam Daerah Istimewa Surakarta juga menjadi puncak konflik Gerakan Anti Swapraja.⁹

Kondisi politik dan sosial merupakan dua entitas yang saling berkaitan erat dan selalu mengalami dinamika. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu adanya konflik dan peperangan. Tindakan konflik yang muncul adalah hasil dari revolusi sosial akibat dari tidak berfungsinya sistem sosial karena penguasa menentang perubahan dalam perkembangan zaman. Konflik-konflik yang meletus disepanjang periode ini telah membawa Surakarta menuju perubahan-perubahan sosial di kemudian hari.

Kasunanan Surakarta maupun Kadipaten Mangkunegaran dan masyarakat kedua daerah tradisional itu mengalami sebuah perubahan sosial akibat masa revolusi tersebut. Perubahan-perubahan itu misalnya saja berdampak pada perubahan birokrasi di Surakarta. Pasca runtuhnya Daerah Istimewa Surakarta, reformasi birokrasi diperkenalkan di Surakarta. Komite Nasional Daerah dibentuk pada September 1945 yang diketuai oleh R. Pandji Suroso. Atas persetujuan Komite Nasional Daerah Surakarta, reformasi birokrasi dilanjutkan melalui pembentukan Pemerintah Direktorium dan diakhiri dengan Pemerintah Kota Besar Surakarta.¹⁰ Birokrasi modern yang dikenalkan sejatinya telah menghapus kedua institusi tradisional tersebut.

⁹ Ari Supto. *Republik Dalam Pusaran Elite Sipil dan Militer*. (Yogyakarta: Matapadi Pressindo, 2019), hlm. 63.

¹⁰ Pemerintahan Direktorium terdiri atas lima wakil Komite Nasional Daerah Surakarta serta empat wakil dari Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran dibahas dalam Muhammad Anggie Farizqi Prasadana. dkk., Keruntuhan Birokrasi Tradisional di Surakarta. (*Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya*: Vol 2, No 2, 2019), hlm. 195-196.

Kasunanan Surakarta yang semula sebagai pemegang kedaulatan tertinggi bersama dengan Kadipaten Mangkunegaran dibawahnya, mengalami pergeseran kedaulatan. Selepas kehilangan kedaulatannya, Kasunanan Surakarta tidak berhak lagi mengatur dan mengelola tanah-tanah milik keraton (*Sunan Ground*).¹¹ Sedangkan, perubahan sosial yang dialami masyarakat ditandai dengan kurangnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kerusakan fasilitas umum dan sistem administrasi baru.¹²

Pada penelitian ini, peneliti berusaha mengkaji lebih lanjut terkait topik permasalahan serta bagaimana urgensi dari penelitian yang akan dilakukan. Setelah membaca berbagai buku, jurnal dan beberapa sumber lainnya peneliti menuangkan topik penelitian yang berjudul “Konflik dan Perubahan Sosial di Surakarta Tahun 1945-1950”. Beberapa peneliti telah mengangkat tema tentang konflik di Surakarta namun belum ada yang meneliti tentang keterkaitan konflik terhadap perubahan sosial dalam periode revolusi di Surakarta ini. Oleh karena itu peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut dalam penelitian skripsi ini.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana proses Konflik dan Perubahan Sosial di Surakarta tahun 1945-1950”, rumusan masalah dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

¹¹ *Sunan Ground* adalah sebuah tanah yang dimiliki oleh Kasunanan Surakarta dan sering disebut Kagungan Dalem dibahas dalam Imdat Mustagfirin, Kedudukan Keraton Surakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah. (*JOM Fakultas Hukum*: Vol 3, No 1, 2016), hlm. 5.

¹² *Ibid.*, hlm. 151.

1. Bagaimana kondisi sosial dan politik Kasunanan Surakarta serta Kadipaten Mangkunegaran menjelang kemerdekaan tahun 1945?
2. Bagaimana gejolak konflik di Surakarta tahun 1945-1950?
3. Bagaimana perubahan sosial pasca pembekuan Daerah Istimewa Surakarta tahun 1946-1950?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berasal dari rumusan masalah, maka tujuan secara umum dari penelitian ini adalah mengetahui “Bagaimana proses Konflik dan Perubahan Sosial di Surakarta tahun 1945-1950”. Adapun tujuan penelitian dari pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi sosial dan politik Kasunanan Surakarta serta Kadipaten Mangkunegaran menjelang kemerdekaan tahun 1945.
2. Untuk menjelaskan gejolak konflik di Surakarta tahun 1945-1950.
3. Untuk mengetahui perubahan sosial pasca pembekuan Daerah Istimewa Surakarta tahun 1946-1950.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan pada bidang keilmuan sejarah khususnya terkait sejarah lokal yang berkaitan dengan konflik dan perubahan sosial di Surakarta tahun 1945-1950.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dengan adanya penelitian ini bisa menambah wawasan dan membuka cakrawala bagi:

1. Akademisi dalam menambah referensi mengajar sejarah lokal di wilayah Surakarta dan sekitarnya.
2. Pemerintah Kota Surakarta dalam mengembangkan buku ajar sejarah lokal.
3. Masyarakat Surakarta dalam memberikan gambaran mengenai proses konflik dan perubahan sosial di Surakarta.

1.5 Tinjauan Teoritis

1.5.1 Kajian Teoritis

Kajian teoritis merupakan hal dasar dalam penelitian serta menjadi kerangka pemikiran peneliti. Kajian teoritis berguna untuk mempertegas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun teori yang dapat mempertegas hasil penelitian ini, sebagai berikut.

A. Teori Konflik

Konflik merupakan suatu hal yang berkenaan dengan satu peristiwa pertikaian dibidang sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum dan sebagainya yang disebabkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi perbedaan norma, ideologi, ras maupun hal lainnya yang berkenaan dengan kehidupan.¹³ Perbedaan-perbedaan itulah yang mampu mendorong terjadinya konflik di suatu masyarakat.

¹³ Wahyudi. *Teori Konflik Dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2021), hlm. 19-20.

Konflik yang terjadi di suatu kelompok masyarakat memang pada kenyataannya disebabkan oleh manusia itu sendiri. Manusia itulah yang memiliki karakteristik, suku, adat, budaya, dan perbedaan lainnya. Perbedaan-perbedaan inilah yang hakikatnya menyulut konflik dan memberikan pengaruh terhadap gejolak-gejolak sosial bahkan melahirkan perubahan sosial yang terjadi dan memberikan warna dikemudian hari.¹⁴ Penelitian ini akan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf. Menurut teori ini, sebuah konflik yang terjadi di masyarakat pasti menyebabkan banyak perubahan.¹⁵ Apabila konflik yang terjadi itu hebat, maka perubahan yang terjadi secara radikal bahkan perubahan struktur secara cepat. Teori ini digunakan untuk menganalisis perjalanan konflik Gerakan Anti Swapraja yang terjadi saat pemberlakuan Daerah Istimewa Surakarta.

B. Teori Perubahan Sosial

Konflik-konflik sosial yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat merupakan satu sumber primer paling berpengaruh dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Perubahan akan menciptakan kelompok dan kelas sosial baru. Konflik antar kelompok dan pembagian kelas sosial baru tersebut akan melahirkan satu perubahan berikutnya.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

¹⁵ Novri Susan. *Sosiologi Konflik: Teori-Teori dan Analisis*. (Jakarta Timur: Kencana, 2019), hlm. 39.

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6-7.

Perubahan sosial juga memiliki sifat berantai yang saling berkaitan. Masyarakat akan terus mengalami suatu perubahan sosial didalam kehidupan untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman. Penelitian ini akan menggunakan teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx. Menurut teori ini perubahan sosial yang dihasilkan didasarkan pada konflik yang terjadi di masyarakat.¹⁷ Konflik tersebut pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap perubahan sosial. Teori ini digunakan untuk menganalisis perubahan sosial secara cepat (revolusi) akibat dari konflik Gerakan Anti Swapraja yang terjadi saat pemberlakuan Daerah Istimewa Surakarta.

1.5.2 Kajian Pustaka

Kajian literatur atau kajian pustaka merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian. Kajian pustaka berguna untuk menambah pengetahuan dan pandangan dalam pengembangan sebuah penelitian, peneliti mencantumkan kajian pustaka yang berguna untuk memperbaiki penelitian sebelumnya. Tujuan utama dari kajian pustaka yaitu sebagai bahan memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang topik yang diteliti dan menemukan pendekatan baru yang dapat digunakan dalam penelitian tersebut. Kajian tentang Surakarta telah dilakukan oleh beberapa orang yaitu:

Pustaka pertama yang peneliti gunakan yaitu sumber primer berupa buku yang berjudul *Sekedar Uraian Tentang Swapraja Surakarta Setelah*

¹⁷ Abdul Wahib Situmorang, *op.cit.*, hlm. 17-30.

Proklamasi Kemerdekaan oleh Woerjaningrat tahun 1959 melalui penerbit Kaha. Buku ini diperoleh dari Perpustakaan Rekso Pustoko yang berisikan paparan mengenai berbagai persoalan Kasunanan Surakarta, khususnya terkait pergolakan penolakan swapraja.

Pustaka kedua yang penulis gunakan yaitu sumber primer berupa buku berjudul *Revolusi di Surakarta* oleh Karkono Kamajaya Patrokusumo. Buku terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1993 ini diperoleh dari Perpustakaan Rekso Pustoko dan berisikan pembahasan mengenai kondisi Surakarta pada awal kemerdekaan, perubahan birokrasi dan aksi-aksi kriminalitas di Surakarta.

Pustaka ketiga yang digunakan peneliti untuk mengetahui dan memahami sejarah konflik di Surakarta adalah buku yang berjudul *Bandit dan Pejuang di Simping Bengawan* karya Julianto Ibrahim cetakan Bina Citra Pustaka. Buku terbitan tahun 2004 ini diperoleh melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berisikan catatan kriminalitas dan kekerasan di Surakarta pada masa revolusi. Peneliti juga mencoba mengupas segala bentuk kriminalitas yang terjadi pada saat-saat genting itu dengan disertai semangat revolusi disisi lain. Semangat revolusi yang membara di jiwa para pejuang ternyata tak dapat dipungkiri bahwa masing-masing elemen juga mempunyai kepentingan tersendiri. Jalannya revolusi dan konflik di Surakarta diawali dengan berpindahnya pusat ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta yang mana disertai pula dengan barisan oposisi pemerintah ikut

pindah ke Surakarta. Barisan oposisi kemudian mencoba membangun citra Surakarta sebagai tandingan pemerintah Indonesia di Yogyakarta.

Pustaka keempat peneliti menggunakan buku yang berjudul *Daerah Istimewa Surakarta* karya Sutiyono dkk. Buku terbitan Putra Bangsa tahun 2009 ini diperoleh dari toko *online* dan menjelaskan tentang sejarah perjalanan swapraja Surakarta meliputi landasan yuridis, filosofis dan historis.

Pustaka kelima yang peneliti gunakan yaitu buku dengan judul *Raja di Alam Republik Keraton Kasunanan Surakarta dan Paku Buwono XII* karya Bram Setiadi dkk. Buku terbitan Bina Rena Pariwara tahun 2001 ini didapatkan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang menjelaskan berbagai rangkaian peristiwa saat pemberlakuan DIS termasuk aksi culik-menculik.

1.5.3 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu: pertama, penelitian yang dilakukan oleh Andi Nurma Utamawan Mahasiswa Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret yang berbentuk jurnal penelitian skripsi tahun 2010, dengan judul penelitian *Pemerintahan Darurat Militer Surakarta dan Dampaknya Terhadap Pemerintahan Kota Surakarta Tahun 1948-1950*. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Pemerintahana Darurat Militer Surakarta akibat dari pergolakan swapraja serta dampak setiap peristiwa tersebut. Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti teliti terletak pada kesamaan fokus

penelitiannya yaitu Surakarta masa revolusi. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti akan membahas lebih spesifik tentang konflik dan akibatnya terhadap perubahan sosial di Surakarta. Termasuk membahas perubahan sistem birokrasi yang salah satunya terdapat pemberlakuan Pemerintahan Darurat Militer Surakarta. Selain itu, batasan temporal penelitian terdahulu dengan yang peneliti teliti yaitu tahun 1948-1950 sedangkan peneliti menggunakan batasan temporal tahun 1945-1950.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Devvi Aryanti Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia berbentuk penelitian skripsi tahun 2013, dengan judul penelitiannya yaitu *Sikap Kasunanan Surakarta dalam Mengatasi Gerakan Anti Swapraja di Surakarta Tahun 1945-1946*. Penelitian ini berfokus pada perjalanan politik serta langkah-langkah konkret Kasunanan Surakarta dalam menyelesaikan Gerakan Anti Swapraja. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang peneliti teliti terletak pada gerakan Anti Swapraja dan batasan temporal tahun yang sama. Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang peneliti teliti terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada sikap atau respon pihak Kasunanan Surakarta terhadap gerakan Anti Swapraja. Sedangkan, pada penelitian ini memfokuskan pada perjalanan konflik-konflik di Surakarta tahun 1945-1950 dan dampak perubahan sosial yang ditimbulkan baik bagi Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran maupun masyarakat luas.

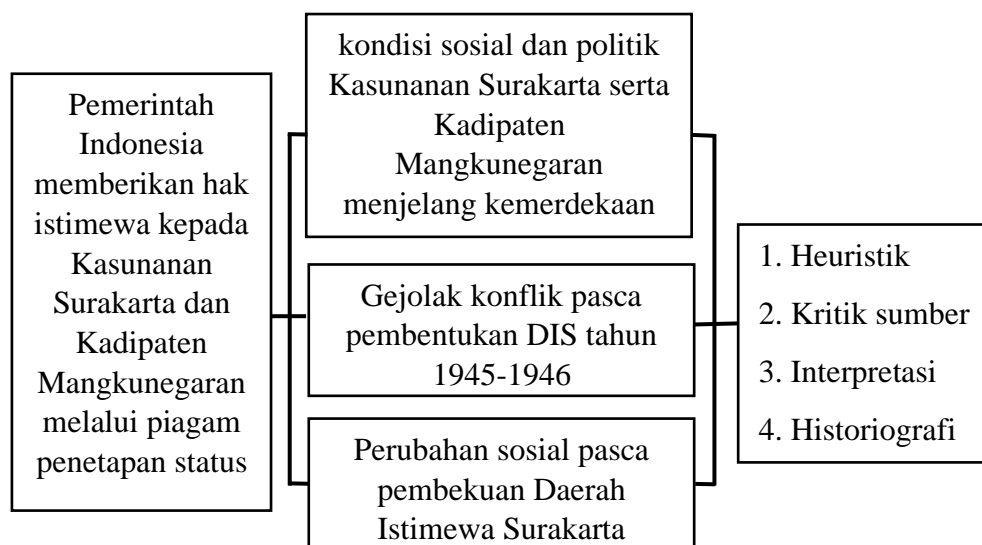
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yaser Pratama Shandy Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Bahasa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang berbentuk penelitian skripsi dengan judul *Bertahan di Tengah Konflik: Revolusi Sosial di Kadipaten Mangkunegaran Tahun 1945-1946*, diterbitkan tahun 2022. Hasil penelitian ini membahas tentang jalannya pemberlakuan swapraja Mangkunegara, kekerasan-kekerasan yang menyertainya dan proses lahirnya kota madya Surakarta. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti teliti yakni sama-sama membahas tentang konflik pada masa pemberlakuan DIS, dimana Mangkunegaran merupakan salah satu bagian di dalam Daerah Istimewa Surakarta bersamaan dengan Kasunanan Surakarta. Perbedaannya adalah bahwa penelitian terdahulu memfokuskan pada Kadipaten Mangkunegaran saja, sedangkan peneliti memfokuskan pada wilayah Surakarta secara keseluruhan yang meliputi Kadipaten Mangkunegaran dan Kasunanan Surakarta.

Keempat, penelitian jurnal artikel ilmiah yang dilakukan oleh Syammy Lilyana dkk, dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta yang berjudul *Sragen di Masa Revolusi: Dampak Sosial dan Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Surakarta 1944-1949*. Hasil penelitian ini membahas tentang gejolak konflik dan perubahan sosial di Sragen sebelum dan sesudah revolusi. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti teliti yaitu dampak sosial yang dihasilkan dari proses revolusi pasca kemerdekaan. Perbedaannya

adalah kurun waktu dan objek yang dipilih, jika jurnal artikel ilmiah saudara Syammsy memilih kisaran tahun 1944-1949 sedangkan peneliti membatasi temporalnya tahun 1945-1950 dengan Surakarta sebagai objek penelitiannya.

1.5.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian. Kerangka konseptual bertujuan untuk membatasi peneliti agar dapat memecahkan masalah dan menjabarkan hasil penelitian sesuai topik permasalahan. Adanya kerangka konseptual membantu peneliti untuk meneliti serta tidak keluar dari konsep yang telah disusun sebelumnya. Penelitian skripsi ini berjudul “Konflik dan Perubahan Sosial di Surakarta Tahun 1945-1950”.



Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual

Keterangan:

Kerangka konseptual diatas merupakan gambaran alur penelitian terkait konflik dan perubahan sosial di Surakarta tahun 1945-1950. Setelah ditentukan rumusan masalah penelitian, selanjutnya maka rumusan masalah dijabarkan kedalam tiga pertanyaan penelitian yang kemudian akan diteliti dengan empat tahapan metode penelitian sejarah.

1.6 Metode Penelitian

Peneliti menggunakan tahapan berupa metode penelitian historis karena penelitian ini menunjukkan fakta-fakta dan data-data sejarah mengenai Konflik dan Perubahan Sosial di Surakarta Tahun 1945-1950. Peneliti melakukan penelitian ini dengan cara pengolahan data pada peristiwa masa lampau yang terdiri atas empat tahapan penelitian sejarah. Meliputi pengumpulan data (heuristik), kritik sumber (verifikasi), penafsiran (interpretasi) dan penelitian sejarah (historiografi).¹⁸

Tujuan peneliti menggunakan metode sejarah yaitu untuk mengetahui secara jelas mengenai kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masa lalu serta agar kejadian tersebut mendapatkan penjelasan yang akurat. Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yaitu menggunakan teknik studi pustaka dan dikumpulkan dengan sistem kartu yang dibedakan menjadi dua kategori yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

¹⁸ Nina Herlina Lubis. *Metode Sejarah*. (Bandung: Satya Historika, 2020), hlm. 115-123.

1.6.1 Heuristik

Heuristik merupakan bagian awal dalam metode penelitian sejarah. Heuristik atau heuristis berasal dari kata *heuriskein* yang diambil dari Bahasa Yunani yang memiliki arti tidak hanya menemukan tetapi juga mencari terlebih dahulu.¹⁹ Heuristik merupakan kegiatan mengumpulkan sumber sejarah yang sesuai dengan tema penelitian sejarah. Heuristik juga memiliki arti segala sesuatu baik langsung maupun tidak langsung menceritakan tentang aktivitas manusia pada masa lalu. Sumber dalam penelitian sejarah terdiri dari dua sumber yaitu sumber primer dan juga sumber sekunder.²⁰ Pada tahap ini peneliti menggunakan sumber primer berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu:

1. Arsip milik Mangkunegaran yang diperoleh dari Perpustakaan Rekso Pustoko yakni Rijksblad Mangkunegaran 1923 dan Rijksblad Mangkunegaran 1924. Kedua arsip tersebut merupakan dokumen tata birokrasi Kadipaten Mangkunegaran.
2. Surat kabar Poestaka Wartu Pradja Mangkoenagaran edisi 20 Desember 1945. Surat kabar ini berisikan tentang Maklumat Sri Paduka Mangkunegara VIII menyikapi kemerdekaan Indonesia yang diperoleh dari Museum Pers Nasional.
3. Surat kabar Kedaulatan Rakjat edisi 4 Mei 1946 dengan judul artikel *Sekitar Daerah Istimewa Surakarta*. Surat kabar yang diperoleh dari

¹⁹ Sulasman. *Metodologi Penelitian Sejarah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 93.

²⁰ Sjamsuddin. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak. (Yogyakarta: Ombak, 2017), hlm.32.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini berisikan beberapa maklumat-maklumat Paku Buwono XII dan Adipati Mangkunegara VIII, pengumuman Barisan Banteng dan respon di daerah semasa pemberlakuan DIS.

4. Surat kabar Kedaulatan Rakjat terbitan 12 Agustus 1946 dengan artikel *Soerakarta Memboeka Halaman Sedjarah Baroe* yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Surat kabar ini memuat berita tentang pembentukan Pemerintahan Karesidenan Surakarta yang disertai pendirian badan eksekutif, pemilihan anggota Dewan Pertahanan Daerah Surakarta serta agenda pembubaran KNIDS.
5. Arsip Rekso Pustoko No. S. 35 yang diperoleh dari Perpustakaan Rekso Pustoko. Arsip ini berisikan peraturan penetapan harga-harga kebutuhan pokok di pusat perbelanjaan seluruh Indonesia.
6. Arsip Rekso Pustoko No. S. 746 yang didapat dari Perpustakaan Rekso Pustoko. Sumber ini berisikan peraturan yang dikeluarkan Dewan Pertahanan Daerah Surakarta mengenai ketentuan dan petunjuk teknis penyetakan barang saat berlangsungnya konflik penolakan DIS.
7. Buku berjudul *Revolusi di Surakarta* oleh Karkono Kamajaya Patrokusumo. Buku terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1993 diperoleh dari Perpustakaan Rekso Pustoko.
8. Buku yang berjudul *Sekedar Uraian Tentang Swapraja Surakarta Setelah Proklamasi Kemerdekaan* oleh Woerjaningrat tahun 1959 terbitan Kaha yang didapatkan dari Perpustakaan Rekso Pustoko.

9. Peraturan Perundangan-undangan yang meliputi UU. No. 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, UU. No. 4 Tahun 1946 tentang Pembentukan Pusat Perkebunan Negara, UU. No. 16 Tahun 1947 tentang Pembentukan Haminte-Kota Surakarta, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1947 tentang Mendirikan Kantor Untuk Mengurus Perusahaan Perkebunan Milik Bangsa Asing yang dikuasai oleh Negara, UU. No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah serta UU. No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.

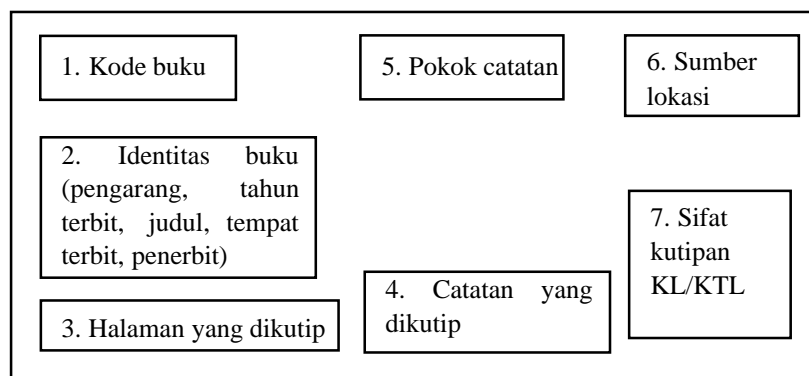
Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak berasal dari pelaku sejarah secara langsung melainkan sumber yang didapat dari penelitian orang lain yang membahas hal yang sesuai dengan tema penelitian. Contohnya seperti buku, wawancara maupun artikel ilmiah. Peneliti menggunakan sumber sekunder dari buku, wawancara dan artikel ilmiah diantaranya sebagai berikut.

1. Buku berjudul *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan* karya Julianto Ibrahim cetakan Bina Citra Pustaka tahun 2004 diperoleh dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
2. Buku dengan judul *Daerah Istimewa Surakarta* karya Sutiyono dkk. Terbitan Putra Bangsa cetakan tahun 2009 diperoleh dari toko buku Gapura Gladak.

3. Buku dengan judul *Raja di Alam Republik Keraton Kasunanan Surakarta dan Paku Buwono XII* karya Bram Setiadi dkk. Buku terbitan Bina Rena Pariwisata tahun 2001 diperoleh dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
4. Majalah Prisma dengan artikel berjudul *Feodalisme dan Revolusi di Surakarta 1945-1946* karya Soeyatno edisi Agustus 1978 didapatkan dari toko buku Terban .
5. Artikel ilmiah berjudul *Mangkunegara VIII: Sikap Dalam Revolusi Sosial Tahun 1945-1946* karya Lamia Rozziana Putri . Artikel ilmiah ini diterbitkan melalui Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi volume 2 nomor 3.
6. Wawancara *sentana dalem* Kasunanan Surakarta, yakni GRAY Koes Murtiyah selaku Ketua Lembaga Dewan Adat dan *Pengageng* Sasono Wilopo Keraton Kasunanan Surakarta.
7. Wawancara tokoh Budayawan Surakarta, yakni Bambang Sugiarto.
8. Wawancara pengurus Masjid Al-Fatih Kepatihan, yaitu M Choiri.

Data-data yang peneliti peroleh diatas akan disimpan dengan menggunakan sistem kartu.²¹ Sistem kartu tersebut berguna untuk memuat pustaka dan termasuk didalamnya kutipan langsung.

²¹ Iyus Jayusman. (2008). *Laporan Penelitian Pemikiran dan Sifat Keagamaan Jenderal Sudirman dalam Pembinaan Mental TNI 1945-1950*. hlm. 68.



Gambar 1. 2 Sistem Kartu

Keterangan :

1.	Kode buku	:	Untuk menyusun daftar pustaka yang sesuai dengan abjad.
2.	Identitas buku	:	Isinya berupa pengarang, tahun terbit, penerbit dan tempat terbit.
3.	Halaman yang dikutip	:	Berupa letak nomor yang dikutip.
4.	Catatan yang dikutip	:	Isinya berupa catatan yang perlu dikutip.
5.	Pokok catatan	:	Untuk mencatat pokok-pokok catatan.
6.	Lokasi sumber	:	Berupa lokasi buku diperoleh atau lokasi sumber.
7.	Sifat kutipan KL/KTL	:	Kutipan langsung atau tak langsung.

1.6.2 Kritik Sumber

Pada tahapan ini peneliti melakukan seleksi terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan dan mulai mencari bagian-bagian terkait dengan permasalahan. Proses kritik sumber terdiri dari dua cara yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Pada tahap kritik sumber, peneliti memilih

arsip, buku, wawancara maupun tulisan lainnya yang ditemukan dengan kritik yang dilakukan pada sumber primer diantaranya:

1. Arsip milik Mangkunegaran yang diperoleh dari Perpustakaan Rekso Pustoko yakni Rijksblad Mangkunegaran 1923 dan Rijksblad Mangkunegaran 1924. Peneliti melakukan kritik eksternal terhadap arsip tata birokrasi Kadipaten Mangkunegaran ini dengan melihat kondisi data dengan jenis kertas yang sudah tua dan rapuh, tinta yang luntur serta keabsahan tahun cetakan arsip tersebut. Sedangkan tahap kritik internal dilakukan dengan membaca keseluruhan isi arsip. Sehingga dapat disimpulkan jika arsip ini layak untuk dijadikan sumber primer.
2. Surat kabar Poestaka Warti Pradja Mangkoenagaran edisi 20 Desember 1945. Surat kabar yang berisikan maklumat Adipati Mangkunegara VIII menyikapi kemerdekaan Indonesia ini telah dilakukan kritik eksternal oleh peneliti dengan melihat kondisi kertas yang telah menguning serta masih menggunakan ejaan lama. Sementara itu tahap kritik internal dilakukan dengan membaca keseluruhan isi surat kabar ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua kalimat didalamnya sudah membuktikan validitas dan keaslian sumber.
3. Surat kabar Kedaulatan Rakjat edisi 4 Mei 1946 dan edisi 12 Agustus 1946. Peneliti telah melakukan kritik eksternal pada kedua edisi surat kabar yang mengabarkan peristiwa Gerakan Anti Swapraja ini dengan melihat kondisi fisik, seperti menggunakan ejaan lama dan kertas yang

sudah usang. Sementara pada kritik internal dilakukan dengan membaca keseluruhan artikel pada surat kabar ini. Telah diketahui jika sumber ini masih menggunakan tata bahasa dan gaya penulisan lama sehingga dapat disimpulkan bahwa surat kabar tersebut dapat digunakan sebagai sumber primer.

4. Arsip Rekso Pustoko No. S. 35, peneliti telah melakukan kritik eksternal terhadap arsip penetapan harga-harga kebutuhan pokok ini dengan melihat kondisi fisik arsip seperti jenis kertas yang digunakan, tulisan yang dihasilkan menggunakan mesin tik dan permukaan arsip yang mulai robek. Selanjutnya arsip yang diperoleh harus melalui kritik internal. Peneliti melakukan kritik internal dengan melihat isi arsip tersebut.
5. Arsip Rekso Pustoko No. S. 746 tentang petunjuk penyetakan barang Dewan Pertahanan Daerah Surakarta, peneliti telah melakukan kritik eksternal dengan melihat kondisi fisik arsip seperti jenis kertas yang digunakan, tulisan yang dihasilkan menggunakan mesin tik dan permukaan arsip yang mulai robek. Selanjutnya arsip yang diperoleh harus melalui kritik internal. Peneliti melakukan kritik internal dengan melihat isi arsip tersebut.
6. Buku berjudul *Revolusi di Surakarta* oleh Karkono Kamajaya Patrokusumo serta buku yang berjudul *Sekedar Uraian Tentang Swapraja Surakarta Setelah Proklamasi Kemerdekaan* oleh Woerjaningrat tahun 1959. Peneliti telah melakukan kritik eksternal

dan internal terkait keabsahan buku yang ditulis langsung oleh pelaku sejarah ini.

7. Peraturan Perundangan-undangan yang meliputi UU. No. 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, UU. No. 4 Tahun 1946 tentang Pembentukan Pusat Perkebunan Negara, UU. No. 16 Tahun 1947 tentang Pembentukan Haminte-Kota Surakarta, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1947 tentang Mendirikan Kantor Untuk Mengurus Perusahaan Perkebunan Milik Bangsa Asing yang dikuasai oleh Negara, UU. No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah serta UU. No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta. Peneliti melakukan kritik eksternal dengan melihat keabsahan fisik yang kemudian dilanjutkan kedalam tahap kritik internal.

1.6.3 Interpretasi

Tahapan ini peneliti mulai menafsirkan hasil analisis data yang telah terkumpul dan telah tersusun sehingga menghasilkan fakta-fakta sejarah yang akurat dan memungkinkan hasil yang beragam, sehingga bisa timbul terjadinya subjektivitas pada tahapan ini. Peneliti melakukan interpretasi setelah peneliti melakukan kritik baik internal maupun eksternal terhadap beberapa sumber yang berkaitan dengan Konflik dan Perubahan Sosial di Surakarta Tahun 1945-1950.

1.6.4 Historiografi

Historiografi merupakan tahapan akhir dalam penelitian sejarah. Historiografi atau penelitian sejarah dilakukan setelah tahapan heuristik, kritik sumber dan interpretasi selesai dikerjakan peneliti. Konflik dan Perubahan Sosial di Surakarta Tahun 1945-1950 ini disajikan dalam bentuk deskriptif dan disusun secara sistematis serta logis.

1.7 Sistematika Penulisan Bab

Pembahasan pada penelitian skripsi ini dibuat secara sistematis dan mudah dipahami, maka peneliti membagi menjadi beberapa bagian yang akan menjelaskan hasil pembahasan skripsi ini. Setiap bagian pembahasannya disusun saling berkaitan satu sama lain. Bagian awal, pada bagian awal terdiri dari sampul atau halaman judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, abstrak, kata pengantar, ucapan terima kasih, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, daftar singkatan dan daftar istilah.

Bab I Pendahuluan berisi tentang judul yang diangkat oleh peneliti, pembahasan umum mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teoritis, kajian pustaka, historiografi yang relevan, kerangka konseptual, metode penelitian sejarah, dan sistematika penulisan.

Bab II Kondisi Sosial dan Politik Kasunanan Surakarta Serta Kadipaten Mangkunegaran Menjelang Kemerdekaan. Pada bab ini sudah memasuki pembahasan dari hasil penelitian. Hal-hal yang akan dibahas dalam bab II terkait dengan kondisi sosial dan politik dari Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjelang kemerdekaan hingga terbentuknya DIS.

Bab III Konflik di Surakarta Pasca Pembentukan Daerah Istimewa Surakarta (DIS), Penjabaran hasil penelitian berlanjut ke bab III yang merupakan pembahasan inti. Pada bab ini menjelaskan tentang gerakan-gerakan Anti Swapraja serta kondisi sosial dan politik saat konflik berlangsung.

Bab IV Perubahan Sosial Pasca Konflik Anti Swapraja, membahas tentang pengaruh sosial baik yang dirasakan pihak Kadipaten Mangkunegaran dan Kasunanan Surakarta maupun masyarakat akibat dari pembekuan Daerah Istimewa Surakarta. Terdiri atas modernisasi birokrasi, pudarnya stratifikasi sosial dan respon masyarakat serta pengambilalihan aset milik Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran.

Bab V berisikan tentang kesimpulan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang berbentuk simpulan dari seluruh pembahasan hingga penerimaan saran yang dilakukan oleh peneliti.

Daftar Pustaka, pada bagian daftar pustaka berisikan tentang sumber-sumber referensi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian. Sumber-sumber yang digunakan berupa arsip, wawancara dan juga buku referensi yang menunjang untuk penelitian ini.